BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang digariskan oleh baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pula lah yang mendorong manusia untuk membentuk sebuah ikatan lahir dan bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah dengan sebuah ikatan yang dinamakan ikatan perkawinan.¹

Di dalam rumah tangga ada kemungkinan terjadi ketidakharmonisan, yang dapat menyebabkan perselisihan, pertengkaran, dan bahkan kekerasan di antara kedua pihak. Jika perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan tidak dapat diatasi, keadaan rumah tangga akan mencapai puncaknya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian atau pembubaran perkawinan. Ketika suami atau istri

¹ Rosmidah, Astra Vigo Putra, 'Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci', *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, 1 (2020), Hlm. 113 <<https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8287/6410>>.

memiliki ketidakrukunan yang mendorong mereka untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian, hal itu disebut "perceraian". Perceraian terjadi ketika salah satu dari mereka tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku, ketidakrukunan antara suami dan istri yang mendorong mereka untuk melakukan perceraian.

Perceraian menurut Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Perceraian menurut hukum agama Islam sangat dilarang namun telah dipositifkan dalam UU Perkawinan yakni Pasal 39 :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perceraian itu terdiri dari cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami selaku pemohon dan berinisiatif kepada Pengadilan Agama, cerai talak dianggap telah berlaku dengan segala akibatnya ketika didepan sidang Pengadilan Agama suami menyatakan (mengikrarkan) talak. Menurut Annalisa Yahanan, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, (2003). Hlm. 42

³ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, (2013). Hlm. 19.

Didalam persidangan perceraian hakim wajib mengupayakan perdamaian terhadap suami/istri yang mengajukan perceraian. Jika didepan Pengadilan upaya perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
2. Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

Maka, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) tersebut apabila para pihak hadir maka hakim wajib untuk menempuh mediasi. Namun, jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dapat dilakukan pemanggilan untuk sidang kedua. Dengan begitu dalam proses peradilan upaya hukum Pengadilan terhadap tergugat berjalan sesuai ketentuannya.

Pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami istri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau istri sebagai tergugat tidak hadir dan menguasai pada seorang advokat.

Berdasarkan Pasal 125 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*)”.

Lalu Pasal 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa:

“Sebelum menjatuhkan keputusan, Pengadilan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil untuk kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua. di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”

Pasal 126 ini memberikan suatu kelonggaran, yaitu dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 125 menyebutkan bahwa hakim tidak wajib segera mengambil keputusan seperti tersebut di atas, akan tetapi dapat memerintahkan agar supaya pihak yang tidak datang itu dipanggil sekali lagi supaya menghadap. Apabila pada panggilan yang ke dua kali ini juga mereka itu tetap tidak menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap, maka barulah diambil keputusan seperti yang tersebut dalam Pasal 125 di atas.

Maksud putusan *Verstek* adalah suatu sistem dalam hukum acara yaitu untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kewenangan. Adapun beberapa syarat tentang putusan *Verstek*, di antaranya adalah:

- a. Tergugat telah di panggil dengan sah dan patuh.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.⁴

Sebelum Pengadilan memutus dengan *Verstek*, Pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang menghadap maka ia akan diputus diputus *Verstek*.⁵

Apabila sidang pertama Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, maka Hakim wajib memanggil Tergugat untuk hadir dalam sidang berikutnya. Tujuan adanya Pasal 126 HIR ini adalah untuk memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya Hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, (2006). Hlm. 383

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2015). Hlm. 105.

adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena ada halangan-halangan tertentu misalnya, salah satu pihak tersebut tidak mengetahui adanya panggilan tersebut. Namun apabila setelah dua kali persidangan dan pihak Tergugat tidak hadir juga setelah dipanggil dengan patut, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, seharusnya persidangan dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 127 HIR :

“Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberi tahu pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*Verzet*).

Maka dari itu, penundaan sidang pertama ke hari lain apabila salah satu pihak tidak hadir adalah suatu keharusan, yaitu hakim wajib menunda sidang, sekaligus memerintahkan sekali lagi memanggil para pihak yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan prinsip *fair trial* yaitu yang biasa disebut dengan asas didengarkan kedua belah pihak. Menurut M. Yahya Harahap berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem* (dengarkan sisi lain), jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *Verstek*.⁶ Jadi, *fair trial* adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan memiliki hak sama dan adil.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, (2005). Hlm. 389.

Prinsip ini berkaitan dengan hak-hak tergugat dalam persidangan yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 yang menyebutkan “Hak-Hak Pokok dalam Persidangan”, hak-hak pokok dalam persidangan tersebut adalah:

1. Hak Untuk dipanggil Sidang dan Menerima Salinan Gugatan/Permohonan.
2. Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik).
3. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian (Bukti-Bukti Tertulis dan Saksi).
4. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.
5. Hak Untuk Mendapatkan Pemberitahuan Isi Putusan.
6. Hak Untuk Meminta Salinan Putusan/Penetapan/Akta Cerai.
7. Hak Untuk Mengajukan Upaya Hukum (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali).
8. Hak Untuk Mengetahui Penggunaan Biaya Perkara.

Namun, apabila dalam Putusan *Verstek* yang perkaranya diputus dalam satu kali sidang maka tergugat tidak dapat melaksanakan dan mendapatkan hak-haknya tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 125, 126, dan 127 H.I.R. yang telah disebutkan sebelumnya. Tentu hal ini menjadi pertanyaan, apakah dengan Putusan *Verstek* tersebut memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Maka prinsip *fair trial* ini sangat penting. Prinsip *fair trial* dalam proses peradilan dilakukan tidak lain untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Pengadilan dalam menerapkan prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap para pihak. Berdasarkan Pasal 129 HIR :

- 1) Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu.
- 2) Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan *Verstek* adalah perlawanan atau *Verzet*. Jadi apabila tergugat dijatuhkan Putusan *Verstek* sedang ia keberatan terhadap putusan tersebut maka ia dapat mengajukan upaya hukum perlawanan *Verzet*. Menurut pasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (*Verzet*) adalah 14 hari dihitung dari tanggal Pemberitahuan Putusan *Verstek* oleh Jurusita Pengganti kepada diri pribadi tergugat atau kuasanya. Dan apabila putusan tidak disampaikan kepada diri pribadi tergugat (*in person*), *Verzet* masih bisa diajukan sampai hari ke 8 (delapan) sesudah *aanmaning* (teguran), kemudian apabila tenggang waktu tersebut terlewati maka mengakibatkan :

1. Gugur hak tergugat mengajukan perlawanan.
2. Tergugat dianggap menerima putusan verstek.
3. Terhadapnya tertutup upaya hukum banding dan kasasi.⁷

Di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, bahwa jumlah angka perceraian terutama perkara cerai gugat dan cerai talak yang di putus, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh SIPP Pengadilan Agama Jambi yang di jelaskan dalam bentuk Tabel :

⁷ 'Perlawanan Verstek' <<https://www.pta-padang.go.id/pages/perlawanan-verstek>>. Diakses pada tanggal 14 November 2023.

Tabel. 1

Data Perkara Perceraian yang Putus *Verstek* di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA Tahun 2020 – 2023

No	Jenis Perkara	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Cerai Gugat	348 Perkara	372 Perkara	388 Perkara	438 Perkara Sampai bulan Oktober
2.	Cerai Talak	130 Perkara	140 Perkara	158 Perkara	62 Perkara Sampai bulan Oktober
Jumlah		478	512	546	500

Sumber :SIPP Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan tabel data perkara perceraian yang putus *Verstek* di Pengadilan Agama Jambi dari Tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan. Tingginya angka perceraian yang terjadi diakibatkan putusan *Verstek* yang dimana kepada pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan.

Putusan *Verstek* seringkali cenderung menguntungkan Penggugat, karena hakim hanya berpegang pada bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak Penggugat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi Tergugat. Terutama pada Putusan Nomor 738/PDT.G/2023/PA.Jmb dimana Tergugat tidak mengetahui dirinya telah di Gugat Cerai oleh Istrinya. Berdasarkan Putusan tersebut dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 yang mana antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dari itu

Penggugat mengajukan gugatan. Namun selama proses persidangan berlangsung, Tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya digugat cerai dan saat mendatangi Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, ternyata perkaranya telah diputus *Verstek* oleh Majelis Hakim dan tidak diberi kesempatan untuk dirinya menjawab ataupun menyanggah dengan satu panggilan sidang dan tidak ada panggilan sidang untuk kedua, hal ini mengacu pada Putusan tersebut yang tertera, bahwa tanggal pembuatan gugatan ialah tanggal 27 juli 2023 dan dilaksanakan sidang pertama pada tanggal 8 agustus 2023, yang artinya hanya 12 hari setelah diajukannya gugatan. Berdasarkan tenggang waktu tersebut, tentu sidang hanya dilakukan satu kali saja dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang ternyata Surat Panggilan Sidang tersebut tidak sampai ke Tergugat lalu diberikan kepada pihak Kelurahan.

Dengan tidak adanya panggilan sidang kedua, maka mediasi tidak berjalan, hal ini telah melanggar Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi yang mana berdasarkan pasal tersebut apabila para pihak hadir maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sedangkan apabila ada salah satu pihak tidak hadir maka dilakukan pemanggilan satu kali lagi pihak yang tidak hadir tersebut. Maka dari itu proses mediasi dipengadilan harus dilakukan. Dan berdasarkan Pasal 126 HIR, Majelis Hakim harus menunda persidangan dan memanggil Tergugat untuk hadir pada persidangan kedua. Oleh karena Putus *Verstek* dalam satu kali sidang , Tergugat tidak dapat menjalankan proses mediasi yang seharusnya dilakukan dalam proses sidang perceraian dan dengan diberikannya Putusan *Verstek* pada Perkara Nomor 738/Pdt.G/2023/Pa.Jmb tersebut Tergugat tidak dapat melaksanakan dan mendapatkan hak-haknya tersebut.

Tentang kapan suatu Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan terdapat pendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dienende*" di dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata "*ten dage dienende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Lebih lanjut lagi Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rbg) memberi kelonggaran untuk tergugat dipanggil sekali lagi.⁸ Maka dalam kedua pasal tersebut tidak mengatakan secara jelas, apakah Putusan *Verstek* dapat diterapkan hanya dalam satu kali sidang. Tentu hal ini menimbulkan pandangan hukum yang tidak jelas. Putusan *Verstek* tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah putusan *Verstek* tersebut dapat memenuhi hak-hak dan memberikan rasa keadilan terhadap Tergugat. Perbedaan pendapat dan penerapan mengenai penjatuhan putusan *Verstek* di Indonesia ini merupakan fenomena menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Putusan *Verstek*, yang dijatuhkan ketika Tergugat tidak hadir dalam persidangan, memiliki implikasi penting bagi para pihak dalam perkara perdata. Idealnya Putusan Hakim yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan perkara sesuai hukum acara perdata haruslah menjunjung tinggi nilai keadilan bagi semua pihak. Hal ini logis karena para pihak di pengadilan adalah pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh tentang putusan *Verstek* dalam perkara cerai gugat. Untuk itulah, penulis

⁸ Ema Rahmawati dan Linda Rachhmainy, 'Penjatuhan Putusan *Verstek* Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 2 (2016), Hlm. 214.

mengangkat judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atas Putusan *Verstek* Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi (Putusan Nomor 738/PDT.G/2023/PA.JMB)**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dari masalah pada skripsi ini, sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Menjatuhkan Putusan *Verstek* Dalam Satu Kali Sidang Terhadap Perkara Gugatan Perceraian Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi ?
2. Apakah Putusan *Verstek* Terhadap Perkara Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb Memberikan Rasa Keadilan dan Terpenuhinya Hak-hak Tergugat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengapa Hakim Menjatuhkan Putusan *Verstek* Dalam Satu Kali Sidang Terhadap Perkara Gugatan Perceraian Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/Pa.Jmb Di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Putusan *Verstek* Terhadap Perkara Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb Memberikan Rasa Keadilan dan Terpenuhinya Hak-hak Tergugat.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara gugatan perceraian

putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/Pa.Jmb di Pengadilan Agama Jambi dan mengetahui putusan *Verstek* terhadap perkara putusan nomor 738/Pdt.G/2023/Pa.Jmb memberikan rasa keadilan dan terpenuhinya hak-hak tergugat.

- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara gugatan perceraian putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/Pa.Jmb di Pengadilan Agama Jambi dan mengetahui putusan *Verstek* terhadap perkara putusan nomor 738/Pdt.G/2023/Pa.Jmb memberikan rasa keadilan dan terpenuhinya hak-hak tergugat..

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, dapat dilihat dari beberapa konsep di bawah ini.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2000). Hlm. 55.

(pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Jadi, perlindungan hukum ini adalah konsep yang menjelaskan tentang pentingnya memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak mereka terlindungi oleh hukum. Pada intinya, perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan hak-hak mereka dihormati.

2. Tergugat

Dalam sebuah proses perdata, tergugat memiliki peran penting dalam memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dasar hukum tergugat terdapat dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Hukum Acara Perdata) di Indonesia. Pasal 1 angka 6 Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa:

“Tergugat adalah pihak yang digugat atau diperiksa dalam suatu perkara perdata”.

Jadi, tergugat adalah pihak yang menjadi pihak yang digugat dalam suatu proses hukum, baik itu dalam proses perdata maupun pidana. Dia memiliki hak untuk memberikan tanggapan, pembelaan, dan bukti dalam persidangan.

3. Putusan *Verstek*

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Mengenai pengertian *Verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak. Putusan

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena ketidakhadiran tergugat meski ia telah dipanggil secara sah dan patut.¹⁰

4. Gugatan Perceraian

Menurut Wira Purwadi, perceraian merupakan masalah terhadap hubungan keluarga, walaupun perkara ini halal tetapi paling dibenci oleh Allah, dalam Kompilasi Hukum Islam cerai dibedakan atas dua. Pertama, cerai talaq yaitu cerai yang berasal dari pihak suami, kedua, cerai gugat yaitu permohonan cerai yang berasal dari pihak istri.¹¹

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusannya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

5. Pengadilan Agama Jambi

Pengadilan Agama Jambi merupakan bagian dari Badan Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Pasal tersebut menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan

¹⁰ Ummul Khaira and Azhari Yahya, ‘Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018), Hlm. 319 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334>>.

¹¹ Wira Purwadi, ‘Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2021), Hlm. 91–104 <<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>>.

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

F. Landasan Teoritis

Kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹² Kerangka teori pula adalah kumpulan dari sejumlah aturan, asas, anggapan, cara, pendapat, keterangan yang disusun untuk menjadi satu-kesatuan secara logis sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan.¹³

Jadi, kerangka teori adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep dalam sebuah penelitian. Dengan adanya kerangka teori, peneliti dapat mengarahkan penelitian mereka dengan lebih terarah, merancang metodologi yang sesuai, dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan lebih baik.

Berikut teori yang akan dimanfaatkan penulis untuk penelitian penulisan skripsi ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah teori kepastian hukum, yang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri terdiri dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memperhatikan siapa yang melakukannya. Setiap

¹² Maiyesti, *Metode Penelitian Hukum*, Sumbang: LPMM Universitas Bung Hatta, (2022). Hlm. 50.

¹³ M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, (1996). Hlm. 203.

orang dapat memperkirakan konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika mereka mengambil tindakan hukum tertentu dengan menggunakan kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, yang dimaksudkan kepastian hukum ialah suatu perlindungan yang menjamin hukum haruslah dilaksanakan melalui cara yang baik. Kepastian hukum mengharapkan terciptanya undang-undang yang mengatur hukum yang dirancang oleh pemerintah yang berwibawa dan berwenang, jadi ketentuan tersebut mempunyai aspek yuridis yang mampu memberi jaminan kepastian bahwa hukum difungsikan untuk suatu aturan yang harus ditaati.¹⁴

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini adalah untuk membahas mengenai status hukum tergugat apabila tidak menghadiri acara persidangan di Pengadilan.

2. Teori Keadilan

Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat, keadilan diperoleh melalui penegakan hukum sedangkan hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang yaitu negara. Oleh karena itu Plato menentukan kriteria keadilan adalah

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, (2002). Hlm. 160.

“kebaikan” yang berarti harmoni dan perimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi rasional.¹⁵

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya “*general theory of law and state*”, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁶

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat nilai-nilai keadilan individu yang dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang memenuhi nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi setiap individu.

Jadi teori keadilan ini dalam Putusan *Verstek*, di mana pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan, hakim harus tetap memastikan bahwa putusannya tetap adil. Hakim harus memastikan terlebih dahulu apakah pemberitahuan sidang sudah benar, sudah dikirim dengan benar ke pihak yang bersangkutan. Hakim juga harus teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di meja persidangan. Karena pihak yang tidak hadir tidak memberikan alasan atau pembelaan, hakim harus ekstra hati-hati agar keputusannya tetap objektif dan adil. Jadi, intinya, dalam putusan *verstek*, hakim harus bisa memastikan bahwa keadilan tetap terwujud, meskipun salah satu pihak yang tidak hadir.

¹⁵ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, (2017). Hlm. 63

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, (2011). Hlm. 7.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan *Putusan Verstek* maka dari itu untuk perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul: *Putusan Verstek* Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis *Putusan* Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1227/Pdt.G/2008/PA.Dpk.). Penulis Ahmad Afandi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010. Penelitian milik Ahmad Afandi merujuk pada bagaimana proses landasan hukum pembuktian dalam perkara yang diputus *Verstek* tersebut.
2. Skripsi yang berjudul: *Putusan Verstek* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013. Penulis Devi Lusiana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2013. Dalam skripsi tersebut fokus membahas tentang bagaimana prosedur pemanggilan dan upaya yang dilakukan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam menghadirkan Tergugat/Termohon, serta alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon dipersidangan berdasarkan fakta persidangan.
3. Skripsi yang berjudul: *Putusan* Perkara Perceraian (Studi Atas *Putusan Verstek* di Pengadilan Agama Wonosari). Penulis Yardema Mulyani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dalam skripsi tersebut berfokus pada faktor-faktor penyebab yang

menjadi alasan para pihak tidak hadir dalam proses persidangan yang secara langsung berpengaruh terhadap Putusan *Verstek*.

Adapun yang membedakan ketiga penulisan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini fokus mengkaji bagaimana Putusan *Verstek* tersebut memenuhi hak-hak Tergugat dan memberikan rasa keadilan pada pihak Tergugat dalam perkara perceraian Putusan di Pengadilan Agama Jambi Perkara Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb.,

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merujuk pada cara-cara penalaran, analisis, dan argumentasi yang bersifat deduksi. Selanjutnya, lebih dominan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif atau pemaparan hasil-hasil penelitian dalam bentuk narasi yang logis dan preskriptif, namun tidak melarang untuk menggunakan analisis yang bersifat kuantitatif berupa angka statistik seperti tabel, bagan, dan gambar sebagai bahan pelengkap analisisnya.¹⁷

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, Yogyakarta: Mirra Buana Media, (2021). Hlm. 103.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat.¹⁸ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁹ Dengan pendekatan perundang-undangan ini penulis mengkaji berbagai aturan hukum yang diantaranya adalah UU Perkawinan, PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 125-127 HIR/RGB Tentang Putusan *Verstek*, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan proses perceraian, hak-hak dan kewajiban tergugat, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada tergugat dalam putusan *verstek*. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan mempelajari dan menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap tergugat diatur dalam konteks Putusan

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 134.

Verstek akibat gugatan perceraian. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi kelemahan atau keunggulan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada tergugat dalam kasus ini.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰

Pendekatan ini digunakan dengan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus-kasus yang telah menjadi keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus dari setiap keputusan tersebut adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk sampai pada suatu keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum. Teknik pendekatan ini di gunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang Perlindungan Hukum terhadap Tergugat atas Putusan *Verstek* akibat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi.

²⁰ *Ibid.* Hlm 138.

3) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²¹

Dalam penelitian ini dengan pendekatan konseptual akan melibatkan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tergugat dalam putusan *verstek* akibat gugatan perceraian, konsep hakim yang adil dan objektif dalam menjatuhkan putusan dan hak-hak tergugat dalam proses peradilan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, dapat mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum tersebut secara mendalam.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber hukum, yang meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

²¹ *Ibid.* Hlm 147

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian.²² Data primer berdasarkan dari :

- 1) HIR/RBg
- 2) Putusan Pengadilan perkara Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb yang diperoleh dari penelitian di Pengadilan Agama Jambi melalui observasi dan wawancara.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi bahan-bahan pustaka, surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai kepada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³ Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pula wawancara terhadap

²² *Ibid.* Hlm. 102

²³ *Ibid.*

narasumber yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperlukan memahami pandangan hakim untuk memberi penguatan terhadap analisis hukum yang sedang diteliti penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan bentuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana pada penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar *online*, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 cara yaitu: study kepustakaan, pengamatan (observasi) selama Magang di Pengadilan Agama Jambi sejak 14 Agustus 2023 sampai 27 Oktober 2023, dan wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi. Langkah awal akan dilakukan dengan study kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah pertimbangan hakim terhadap putusan *Verstek* dan perlindungan hukumnya terhadap tergugat, kemudian langkah selanjutnya melakukan observasi dan wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Observasi dan wawancara ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi-kondisi sosial yang ada dan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk

menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Irwansyah, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen dan wawancara terbuka.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui gambaran secara umum isi dari penulisan Skripsi skripsi ini dapat dilihat pada sistematika yang telah disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Perceraian di Indonesia dan Proses Beracara di Pengadilan Agama Jambi yang menjelaskan diantaranya: Pengertian Perceraian, Alasan Perceraian, Akibat Perceraian, Cara Mengajukan Gugatan dan Macam-macam Putusan. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab selanjutnya.

²⁴ Irwansyah, *op.cit.* Hlm. 138

BAB III Hasil Dan Penelitian Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb di Pengadilan Agama Jambi, dan apakah putusan *Verstek* terhadap perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Jmb menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

BAB IV Penutup, pada bab ini kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.